

JURNALISME SENSITIF GENDER DALAM MEDIA ONLINE BERKONTEN KHUSUS

**(Studi Kasus Penerapan Jurnalisme Sensitif Gender dalam
Kebijakan Redaksional Swara Nusa Perkumpulan
Keluarga Berencana Indonesia)**

Antonia Adeg Ery P.
Dr. Lukas S. Ispandriarno, M.A.
Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari No.6 Yogyakarta 55281
Email: antonia.adega@gmail.com

Abstract: *Fenomena ketimpangan berbasis gender banyak terjadi di Indonesia, padahal keadilan gender merupakan salah satu wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena ketimpangan ini kemudian dilanggengkan oleh media massa, baik melalui manajemen organisasi maupun pemberitaan yang dihasilkan oleh media yang bersangkutan. Hal ini yang melatarbelakangi berdirinya Kantor Berita Swara Nusa PKBI. Swara Nusa berusaha mewujudkan praktik jurnalisme yang lebih ideal, dalam hal ini jurnalisme sensitif gender, untuk membangun kesadaran kritis pembaca perihal isu gender. Tulisan ini menggambarkan penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa yang meliputi, pemilihan fakta sosial, pemilihan angle penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase.*

Key word: *jurnalisme, gender, jurnalisme sensitif gender, kebijakan redaksional*

PENDAHULUAN

Mukhotib MD (1998: xv-xvi) menyatakan bahwa media massa diyakini dapat melanggengkan ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam marginalisasi, sub-ordinasi, beban ganda, *stereotype* dan kekerasan yang menyebabkan perempuan berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan. Ketidakadilan gender tersebut bahkan mampu menghapuskan hak-hak asasi perempuan sebagai manusia.

Media massa, baik dalam manajemen organisasi maupun pemberitaan, selama ini masih mengandung bias gender. Menurut Akhmad Zaini (Mukhotib: 1998: 79), bias gender dalam manajemen organisasi dapat terjadi melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berorientasi pada kesetaraan dan diterapkan oleh sebuah organisasi pers, misalnya kebijakan yang terkait dengan rekrutmen, promosi, mutasi, penempatan dan pendelegasian tugas. Selain itu, bias gender juga termanifestasi dalam pemberitaan, misalnya melalui penggunaan bahasa yang seringkali memojokkan korban kekerasan berbasis gender, salah satunya perkosaan, atau sudut pandang pemberitaan yang tidak berpihak pada keadilan gender, misalnya menyalahkan pakaian korban perkosaan. Fenomena tersebut kemudian melatarbelakangi berdirinya Kantor Berita Swara Nusa.

Swara Nusa didirikan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada tahun 2009. Arsita Mega Okta, selaku Redaktur Pelaksana Swara Nusa, menuturkan bahwa Kantor Berita Swara Nusa melalui produknya, yaitu portal berita *online* berkonten khusus, menasar para pelaku media di Indonesia (wawancara, 16 Juli 2014).¹ Swara Nusa menjadi kantor berita pertama di Indonesia yang mengusung isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM sebagai isu utama (Antara, 2009). Swara Nusa berusaha mengubah *mindset* para pelaku media supaya lebih ramah ketika berbicara mengenai, salah satunya gender (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).

Lingga Tri Utama (wawancara, 4 April 2014), selaku mantan Editor Swara Nusa PKBI, menyatakan bahwa penulisan berita yang banyak disajikan media massa pada umumnya lebih didominasi oleh hasil kerja teknis jurnalistik dan cenderung mengabaikan nalar idealisme, serta komitmen kepada kebenaran dan keadilan. Pembebasan cara berpikir dan bertindak yang terbelenggu pada hubungan kekuasaan tidakimbang kerap menghasilkan produk jurnalistik yang menyudutkan sebagian kelompok dan membenarkan kelompok lain secara tidak adil (Swara Nusa, 2008: 1). Jika hal ini meningkat menjadi semacam budaya dalam jurnalisme, konsumen media dapat terjebak dalam informasi yang tidak mencerdaskan, bahkan melanggar ketidakadilan sosial, apalagi ketika bicara mengenai isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

Swara Nusa dibuat dalam rangka mewujudkan praktik jurnalisme yang lebih ideal, salah satunya jurnalisme sensitif gender (Lingga, wawancara, 4 April 2014). Jurnalisme sensitif gender akan menghasilkan pemberitaan yang lebih manusiawi dan adil (Mukhotib, 1998: xvi). Jurnalisme sensitif gender akan mendorong terciptanya sebuah keadilan berbasis gender di tengah masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional sebuah media *online* berkonten khusus, Swara Nusa PKBI.²

¹ Konten khusus (Antara, 2009) diartikan sebagai konten seputar isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM.

² Penerapan adalah perihal mempraktikkan (KBBI, 2014)

KERANGKA TEORI

1. *Circuit of Culture: Media dan Gender*

Menurut Stuart Hall (1997: 15) dalam Teori Representasi, *circuit of culture* membantu kita untuk mengetahui dan melihat bagaimana proses sebuah makna diproduksi dan diartikulasikan dalam konteks budaya. Lima unsur penting dalam proses ini, yaitu representasi, identitas, regulasi, produksi dan konsumsi. Kelima unsur ini berhubungan timbal balik atau memiliki hubungan dua arah antara satu dengan yang lainnya. Representasi menjadi bagian penting dari proses dimana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota dalam suatu budaya.

Representasi adalah produksi makna dari konsep yang ada di kepala kita melalui bahasa (Listiorini, 2009: 52). Makna hanya bisa dibagi melalui akses bahasa. Bahasa mampu mengonstruksi makna. Interaksi sosial yang berbeda membuat makna juga diproduksi dan dipertukarkan secara berbeda.

Media massa, dalam perspektif kajian budaya, menjadi salah satu tempat untuk memproduksi dan mereduksi makna. Dalam kajian budaya pop, Colin Sparks (Adlin, 2006: 94) mengelompokkan pers menjadi dua, yaitu pers populer dan pers berkualitas.

Menurut Fikse, pers populer beroperasi pada garis batas antara ruang publik dan ruang privat: gayanya sensasional, terkadang skeptis, tidak jarang bersungguh-sungguh secara moralistik,ungkapannya populis, kelonggaran bentuknya menampik perbedaan stilistik antara fiksi dan dokumenter, antara berita dan hiburan (Dahlgren dan Sparks, 1992: 48).

Dalam sebuah analisis tentang nilai berita, Sparks (Adlin, 2006: 94) menyimpulkan bahwa bahkan ketika keduanya mengusung isu yang sama, cara pers populer dan pers berkualitas dalam menyampaikan sebuah makna terkait isu tersebut akan berbeda satu dengan yang lain.

Makna gender dikonstruksi oleh pers populer di tengah masyarakat yang cenderung menganut ideologi dominan, seperti ideologi patriarki, heteronormativitas dan kapitalisme. Konstruksi gender di tengah masyarakat dengan ideologi dominan, seperti patriarki, cenderung bias. Laki-laki selalu diidentikkan dengan maskulinitas, sedangkan perempuan dengan femininitas. Femininitas dalam budaya patriarki diidentikkan sebagai *the second sex* atau jenis kelamin kedua yang memiliki ketertundukkan di bawah kontrol laki-laki. Implikasinya, budaya patriarki seringkali menyeret perempuan dan femininitas pada posisi yang lemah, tertindas dan tidak memiliki posisi tawar

2. Penerapan Jurnalisme Sensitif Gender dalam Kebijakan Redaksional

Debra J. Huls (Mukhotib, 1998: xii-xiii) menyatakan bahwa keadilan gender merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM)---tanpa penegakan keadilan gender, maka wujud HAM akan tumpang. Debra menambahkan bahwa sudah selayaknya penegakan keadilan gender semakin merata di seluruh sektor, termasuk media tanpa terkecuali (Mukhotib, 1998: xii-xiii). Pada dasarnya, media memang merupakan cermin dan refleksi dari kondisi sosial budaya masyarakat (Mukhotib, 1998: xxiv). Tidak mengherankan bila dalam konteks media massa secara umum tercermin bias-bias gender. Masih banyak media yang mengeksploitasi perempuan dan

menjadikannya komoditi untuk meningkatkan tiras. Agnes Astiarini (Mukhotib, 1998: xxv), di sisi lain mengungkapkan bahwa media massa merupakan wahana penting untuk ikut mengubah opini di masyarakat karena kemampuannya membentuk realitas dengan daya jangkau amat luas, maka pemahaman akan jurnalisme sensitif gender mutlak diperlukan untuk mengubah masyarakat masuk dalam sebuah tatanan baru, masyarakat yang mengusung kesetaraan dan keadilan berbasis gender.

Akhmad Zaini Abar (Mukhotib, 1998: 57-61) merumuskan beberapa tahapan yang perlu diterapkan untuk menciptakan sebuah jurnalisme sensitif gender. Pertama (Abar dalam Mukhotib, 1998: 57-58), perlu dibangun kesadaran gender, kolektif maupun individual, di berbagai tingkatan jajaran redaksional. Kesadaran gender secara kolektif maupun individual di kalangan wartawan akan melahirkan visi dan orientasi kebijakan redaksional yang menjunjung kesetaraan berbasis gender. Kedua (Abar dalam Mukhotib, 1998: 58-59), di dalam praktik organisasi kerja redaksional, perlu tata struktural sedemikian rupa sehingga mencerminkan keadilan gender. Organisasi sebuah media, melalui kebijakannya, harus memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki, baik yang terkait dengan struktur, rekrutmen, promosi, penempatan, mutasi, maupun pendelegasian tugas. Ketiga (Abar dalam Mukhotib, 1998: 59-60), di tingkat kerja teknik jurnalistik. Penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat ini berkaitan erat dengan kebijakan redaksional sebuah media. Kebijakan redaksional (Nurhasanah, 2011) merupakan dasar pertimbangan yang menjadi acuan sikap media terhadap suatu peristiwa. Kebijakan redaksional mencerminkan ideologi media bersangkutan. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional terlihat dari ada atau tidaknya kebijakan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan profesional para wartawan dalam melihat dan menulis problematika gender. Kebijakan ini meliputi kebijakan pemilihan fakta sosial, *angle* penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase.

Penelitian ini berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat jurnalistik. Penelitian tidak berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat kognitif karena kesadaran gender, kolektif maupun individual, pelaku media lebih tepat diteliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian juga tidak berfokus pada penerapan jurnalisme sensitif gender di tingkat organisasi karena jurnalisme sensitif gender belum tentu terwujud bahkan dengan keadaan dimana proporsi wartawati lebih besar dibandingkan wartawan. Pemahaman akan kesetaraan gender tidak memandang jenis kelamin. Perempuan maupun laki-laki, wartawan maupun wartawati, sama-sama berpotensi memiliki pemahaman yang baik maupun sebaliknya dalam konteks kesetaraan gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Riset ini merupakan penelitian dasar yang bersifat deskriptif dan bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dasar mengenai jurnalisme

sensitif gender. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola dan wartawan Swara Nusa PKBI kantor biro DIY, sebagai kantor biro pusat pengelolaan Swara Nusa, antara lain Mukhotib MD (pemimpin umum, editor), Maesur Zaky (pemimpin redaksi, editor), Arsita Mega (redaktur pelaksana), Annisa Armaelis (reporter) dan Emilda Rizky (kontributor).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kasus. Menurut Yin (Ishak, 2011: 206-209), studi kasus dapat menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan kebutuhan data, peneliti memilih untuk mengusung satu dari dua jenis penelitian tersebut, yaitu penelitian kualitatif.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Peneliti menerapkan strategi analisis data *relying on theoretical proportion* dikombinasikan dengan teknik analisis *pattern matching*. Teknik analisis ini biasa dipakai dalam penelitian kuantitatif. Penerapannya dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mendeteksi kata kunci dari jawaban masing-masing narasumber. Penjodohan berpola kemudian dilakukan terhadap kata kunci dari jawaban masing-masing narasumber tersebut.

PEMBAHASAN

Proses produksi dan artikulasi sebuah makna dalam konteks budaya tertentu dapat diketahui dan dilihat melalui *circuit of culture* (Hall, 1997: 15). Hal tersebut dijelaskan oleh Stuart Hall dalam Teori Representasi. Representasi menjadi bagian penting dari proses dimana makna diproduksi dan dipertukarkan antara anggota dalam suatu budaya. Representasi adalah produksi makna dari konsep yang ada di kepala kita melalui bahasa (Listiorini, 2009: 52). Makna dipertukarkan melalui bahasa dan bahasa mampu mengonstruksi makna. Interaksi sosial yang berbeda membuat makna juga diproduksi dan dipertukarkan secara berbeda.

Circuit of culture menunjukkan bagaimana makna gender dikonstruksi di tengah masyarakat yang cenderung menganut ideologi dominan, salah satunya ideologi patriarki. Media merupakan salah satu agen sosialisasi makna. Dalam kajian budaya pop, Colin Sparks (Adlin, 2006: 94) mengelompokkan pers menjadi dua, yaitu pers populer dan pers berkualitas. Pers populer cenderung melanggengkan diskriminasi berbasis gender, misalnya melalui gaya bahasa yang sensasional dalam pemberitaan kasus perkosaan. Kelonggaran bentuknya menampik perbedaan stilistik antara berita dan hiburan (Fikse dalam Adlin, 2006: 94). Karakteristik ini membuat produk pers populer memiliki kecenderungan menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan yang menarik tanpa mempertimbangkan aspek empati. Jika hal tersebut meningkat menjadi semacam budaya dalam jurnalisme, pembaca akan terjebak dalam informasi yang tidak mencerdaskan, bahkan melanggengkan ketidakadilan sosial, apalagi ketika bicara mengenai isu kesehatan seksual dan reproduksi, gender dan HAM (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014). Swara Nusa kemudian

berusaha hadir sebagai pers berkualitas. Swara Nusa, melalui proses produksi berita, memproduksi makna gender dengan perspektif lebih adil.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh interaksi sosial Swara Nusa terhadap lembaga sosial lain di sekitarnya yang juga memperjuangkan kesetaraan dan keadilan berbasis gender, misalnya PKBI dan komunitas dampingannya, yaitu Perempuan Pekerja Seks atau PPS, komunitas waria, gay, remaja jalanan, remaja sekolah dan komunitas lain yang rentan mendapatkan diskriminasi berbasis gender. Swara Nusa merupakan representasi dari kelompok masyarakat tersebut, maka kebijakan redaksional Swara Nusa diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang cenderung dirugikan dalam fenomena ketimpangan gender.

1. Kebijakan Redaksional Swara Nusa dalam Pemilihan Fakta Sosial

Swara Nusa mengusung tiga isu dalam pemberitaannya, yaitu isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Mukhotib MD (wawancara, 18 Juli 2014) menyimpulkan bahwa penerapan jurnalisme sensitif gender dalam pemberitaan Swara Nusa berkaitan erat dengan pembahasan isu gender. Mukhotib MD (wawancara, 18 Juli 2014), Maesur Zaky (wawancara, 16 Juli 2014), Annisa Armaelis (wawancara, 21 Juli 2014) dan Emilda Rizky (wawancara, 21 Juli 2014) menyepakati bahwa pemilihan isu gender dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat diskriminasi berbasis gender, yang bukan hanya menimpa perempuan, namun juga laki-laki, karena adanya sederet relasi kuasa yang tidak berorientasi pada kesetaraan. Menurut Mukhotib MD (wawancara, 18 Juli 2014), Pemimpin Umum Swara Nusa, Swara Nusa sebagai garda informasi PKBI memperjuangkan gender kebudayaan. Swara Nusa tidak melihat gender dengan *ganis*: laki-laki dan perempuan, oposisi biner, perempuan harus hadir dan menjadi nomor satu dan sebagainya (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014). Swara Nusa lebih mempercayai bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dikonstruksi dan menjadi korban dari budaya.

Mukhotib menyimpulkan bahwa mengapa kemudian perempuan lebih banyak menjadi korban, karena laki-laki adalah korban yang terlihat cenderung diuntungkan oleh konstruksi budaya, padahal belum tentu (wawancara, 18 Juli 2014). Laki-laki juga menjadi korban karena manusia yang manusiawi adalah manusia yang tidak merampas hak manusia lain. Narasumber yang merupakan salah satu pendiri Swara Nusa ini menerangkan bahwa laki-laki dikonstruksi oleh budaya untuk menjadi tidak manusiawi dengan merampas hak orang lain beralaskan kebudayaan (Mukhotib MD, wawancara, 18 Juli 2014). Mukhotib (wawancara, 18 Juli 2014) menambahkan bahwa “lebih *sok pintar* lagi adalah ketika laki-laki merampas hak perempuan atas nama agama.”

Menurut Mukhotib (wawancara, 18 Juli 2014), pergerakan gender oleh Swara Nusa bukan perjuangan menyetarakan gender dengan alih-alih “menguatkan” perempuan lalu “membanting” laki-laki, tetapi memanusiakan perempuan dan memanusiakan laki-laki. Swara Nusa berusaha membangun kesadaran utuh dengan mengubah konstruksi budaya yang tidak adil melalui pemberitaan yang komprehensif (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014, Kantor PLU Satu Hati). Usaha

ini dilakukan Swara Nusa untuk mengurangi tingkat diskriminasi berbasis gender yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

Swara Nusa mendapatkan berbagai laporan ketimpangan berbasis gender dari mitra strategisnya, yaitu komunitas dampingan PKBI DIY, yang meliputi komunitas waria, remaja jalanan, remaja sekolah, gay dan perempuan pekerja seks (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014). Swara Nusa kemudian menugaskan jurnalisnya yang tersebar di 18 kota besar di Indonesia untuk melakukan pemberitaan mendalam terhadap berbagai ketimpangan berbasis gender yang dilaporkan.

2. Kebijakan Redaksional Swara Nusa mengenai Pemilihan *Angle*

Selain melalui pemilihan isu, Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*. Pemilihan *angle* dalam pemberitaan Swara Nusa selalu mengacu pada nalar berbasis hak. Swara Nusa memprioritaskan ruang bicara kepada mereka yang cenderung dirugikan perihal kasus diskriminasi berbasis gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014). Swara Nusa juga membangun kesadaran kritis pembacanya dengan mengaitkan isu gender dengan semua relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan dan cenderung bersifat diskriminatif (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014). Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi Swara Nusa (2008: 1), yaitu membebaskan cara berpikir dan bertindak yang selama ini terbelenggu oleh hubungan kekuasaan yang tidakimbang dan menyudutkan sebagian kelompok, serta membenarkan yang lain secara tidak adil.

Hal di atas nyata dalam salah satu editorial Swara Nusa yang berjudul “Remaja Hamil Itu Korban”. Artikel tersebut sama sekali tidak menyudutkan remaja perempuan maupun remaja laki-laki yang bersangkutan. Swara Nusa menguak fenomena ini lebih dalam dengan memberi penjelasan komprehensif mengenai akar permasalahan dari fenomena tersebut, contohnya terdapat dalam paragraf ketiga editorial:

Latar belakang terjadinya kehamilan pada remaja juga tak kalah pelik. Informasi yang kurang terkait kesehatan reproduksi dan seksual bergandengan dengan nilai-nilai yang tidak setara dalam memandang perempuan dan laki-laki, tidak hanya telah membuat sejumlah remaja keliru mengambil keputusan atas perilaku seksualnya, namun juga menjebak masyarakat dan para pembuat kebijakan pada sikap plin-plan terhadap seksualitas remaja (Utama, 2013).

Paragraf di atas menjelaskan bahwa dalam kasus kehamilan remaja, baik remaja perempuan, maupun remaja laki-laki, merupakan korban dari sistem yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi pendidikan seksualitas, padahal hak-hak seksual adalah bagian dari hak asasi manusia yang sesungguhnya telah tercantum pada hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia dan pernyataan-pernyataan dalam konsensus lainnya. Hak-hak seksual merupakan hak setiap orang...untuk: (salah satunya) mendapatkan pendidikan seksualitas (WHO, 2012). Annisa Armaelis menambahkan bahwa pemilihan *angle* Swara Nusa selalu berorientasi kepada terciptanya keadilan maupun kesetaraan berbasis gender (wawancara, 21 Juli 2014).

3. Kebijakan Redaksional Swara Nusa terkait Penulisan

Penerapan jurnalisme sensitif gender juga tampak pada kebijakan redaksional Swara Nusa dalam konteks penulisan, khususnya melalui penggunaan terminologi atau istilah yang mendukung ideologi Swara Nusa. Ketika *circuit of culture* menjelaskan bahwa media kebanyakan cenderung menggunakan banyak terminologi yang tidak berpihak pada kesetaraan dan keadilan berbasis gender dalam rangka memenangkan kepentingan kelompok dominan, Swara Nusa melakukan hal sebaliknya. Swara Nusa, melalui kebijakan redaksional perihal penulisan, menerapkan jurnalisme sensitif gender dengan merumuskan kamus terminologi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

TABEL 1
Terminologi Pendukung Ideologi Swara Nusa

NO	ISTILAH SWARA NUSA	UNTUK MENGGANTI ISTILAH	ALASAN
1.	perempuan	wanita, gadis, cewek	Kata “wanita”, “gadis” dan “cewek” tidak merepresentasikan ideologi Swara Nusa. Kata “wanita”, <i>wani ditata</i> , menggambarkan perempuan yang tidak mampu membuat keputusan sendiri sehingga harus selalu diatur atau ditata (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).
2.	laki-laki	pria, lelaki, cowok	Terminologi “laki-laki” dianggap lebih sensitif gender.
3.	remaja	ABG, bocah	Annisa Armaelis (wawancara, 21 Juli 2014, <i>Youth Center PKBI DIY</i>) menyatakan bahwa terminologi “ABG” dan “bocah” dianggap merepresentasikan remaja yang belum pantas memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri.
4.	Perempuan Pekerja Seks (PPS)	PSK, WTS, pelacur, perempuan nakal	“PPS” merepresentasikan perempuan sebagai subjek yang menentukan pilihan untuk bekerja sebagai pekerja seks (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).
5.	gay atau lesbian	homo, penyuka sesama jenis, orientasi seksual tidak normal, orientasi menimpang	Perbedaan orientasi seksual merupakan keberagaman, bukan penyimpangan (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).
6.	Waria	banci, bencong, wadam	
7.	termarjinalkan	marjinal, minoritas	“Termarjinalkan” mengandung arti tidak sengaja dimarjinalkan. Tindakan marjinalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki di tengah masyarakat terjadi atas kesadaran semu yang dibangun oleh konstruksi budaya (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).
8.	Pemiskinan	kemiskinan	Menurut Mukhotib MD (wawancara, 18 Juli 2014), “pemiskinan” menjelaskan bahwa tindakan memiskinkan seseorang dalam konteks kekerasan berbasis gender berbeda dengan “kemiskinan” yang cenderung hanya dibaca dalam konteks ekonomi.
9.	hubungan seksual	hubungan intim, hubungan layaknya suami istri, kuda-kudaan, main, ngeseks	Kata-kata yang multitafsir, seperti “kuda-kudaan”, dapat membawa pembaca terjebak pada informasi-informasi yang menyesatkan dan tidak mencerdaskan, serta hanya akan melanggengkan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).
10.	diperkosa	digagahi, digauli, ditipu luar dalam,	Penggunaan kata “digagahi” dan sebagainya tidak mencerminkan rasa empati (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).

		digilir	2014) karena dapat kembali menyeret korban perkosaan pada posisi yang lemah, tertindas dan tidak memiliki posisi tawar.
11.	orang terinfeksi HIV, status HIV positif	ODHA, orang yang terjangkit HIV, pengidap HIV	HIV dan AIDS adalah dua hal yang berbeda. Kata “penderita” maupun “pengidap” dianggap tidak menunjukkan rasa empati (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014) karena dapat memojokkan subjek pemberitaan.
12.	orang dengan status AIDS	ODHA, penderita AIDS, pengidap AIDS	
13.	LGBTIQ	homo-homo, kaum homoseks	Perbedaan orientasi seksual merupakan keberagaman, bukan penyimpangan (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).
14.	Bekerja	mangkal, nongkrong, jualan, menjajakan diri	Swara Nusa memilih kata “bekerja” untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada kata “mangkal”, “nongkrong”, “jualan” dan “menjajakan diri” (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014). Kata-kata tersebut juga multitafsir, misalnya kata “nongkrong” yang dapat diartikan sebagai kegiatan “bersenang-senang” untuk mengisi waktu luang.
15.	ditangkap	diciduk, diangkut, diamankan, digaruk, dibersihkan	Kata “diamankan”, misalnya, menggambarkan subjek pemberitaan yang bersangkutan seolah-olah merupakan pelaku tindak kejahatan dan mengancam keamanan publik.

Sumber: Swara Nusa (2008: 34)

4. Kebijakan Redaksional Swara Nusa dalam Konteks Reportase

Selain itu, Swara Nusa menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui kebijakan redaksional dalam konteks reportase. Kebijakan redaksional tersebut meliputi ketentuan penerapan empat prinsip dalam reportase, yaitu prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas, prinsip diskriminasi dan prinsip penguatan. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui pemilihan narasumber. Swara Nusa memprioritaskan partisipasi bebas dan aktif dari narasumber-narasumber yang cenderung dirugikan dalam suatu kasus kekerasan berbasis gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014). Kontak-kontak formalitas dengan kelompok elite tetap dilakukan walaupun tidak secara intensif. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengenali para penanggung jawab pemenuh hak, seperti pemerintah, sektor swasta dan aparat penegak hukum. Swara Nusa, melalui penerapan prinsip akuntabilitas, mengupayakan *cover both side* sekaligus mengingatkan tanggung jawab para pemenuh hak (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).

Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui prinsip non diskriminasi dalam reportasenya. Prinsip ini secara khusus difokuskan kepada individu atau kelompok yang tidak diuntungkan, misalnya dalam kasus perkosaan, wartawan Swara Nusa diwajibkan untuk memposisikan diri sebagai teman bicara ketika melakukan wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dan tidak merasa dipojokkan (Armaelis, wawancara, 21 Juli 2014). Prinsip selanjutnya adalah prinsip penguatan. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa Swara Nusa bukanlah media yang melakukan advokasi hanya dengan meliput lalu mempublikasikan berita, namun lebih dari itu, Swara Nusa mengawal usaha subjek pemberitaan untuk mendapatkan haknya

dengan melakukan intervensi---mengajak subjek pemberitaan yang bersangkutan menjadi agen perubahan yang sesungguhnya (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).

Swara Nusa menjunjung tinggi keempat prinsip tersebut dalam reportasenya. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk jurnalistik yang ramah gender. Swara Nusa juga memiliki sebuah panduan reportase, dengan 21 poin di dalamnya, yang berorientasi kepada terciptanya kesetaraan dan keadilan berbasis gender, antara lain sebagai berikut.

(1) Jangan menyebutkan kata “laki-laki” selalu di depan kata “perempuan” (Swara Nusa, 2008: 29) karena dapat menggambarkan seakan-akan posisi perempuan selalu berada di bawah laki-laki (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).

(2) Jika hendak menyebutkan perempuan maupun laki-laki yang mengikuti pasangannya, yang adalah pejabat, gunakan kata “pasangan”, bukan kata “istri”, maupun “suami”, untuk mengkomodir eksistensi pasangan homoseksual (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

(3) Perempuan jangan hanya ditampilkan dalam laporan khusus mengenai problem atau isu perempuan semata-mata (Swara Nusa, 2008: 29), melainkan juga mengenai kompetensi maupun pencapaian perempuan, serta penggambaran lain yang melawan pelabelan negatif yang selama ini melekat pada perempuan (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

(4) Tidak terus menerus berkonsentrasi pada isu sensasional, seperti sunat perempuan atau pembunuhan perempuan atas nama kehormatan (Swara Nusa, 2008: 29). Jurnalis tidak boleh mengabaikan konteks yang lebih luas dalam hal penindasan perempuan (Okta, wawancara, 16 Juli 2014). Banyak kekerasan terhadap perempuan yang tidak disadari oleh masyarakat sebagai bentuk kekerasan, misalnya menggoda perempuan yang sedang berjalan dengan siulan.

(5) Gambarkan perempuan dan laki-laki dalam gambaran yang setara (Swara Nusa, 2008: 29). Jurnalis harus berorientasi pada keadilan berbasis gender ketika melakukan reportase, misalnya dengan tidak mengidentikkan perempuan dengan ruang domestik dan laki-laki dengan ruang publik ketika berbicara mengenai pekerjaan (Okta, wawancara, 16 Juli 2014). Annisa Armaelis menambahkan bahwa tidak semua perempuan nyaman bergerak hanya di sektor domestik, begitupun laki-laki (wawancara, 21 Juli 2014). Emilda Rizky mengungkapkan bahwa banyak laki-laki yang depresi akibat tidak mendapatkan pekerjaan atau memiliki gaji dengan nominal di bawah gaji istrinya (wawancara, 21 Juli 2014). Hal tersebut dapat terjadi ketika laki-laki yang bersangkutan “termakan” oleh konstruksi budaya yang selama ini tidak adil.

(6) Hati-hati membuat asumsi dalam hasil reportase mengenai peran perempuan yang “sepantasnya” (Swara Nusa, 2008: 30). Jurnalis tidak diperkenankan menggiring pembaca kembali kepada konstruksi budaya yang tidak adil (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

(7) Berdiskusilah dengan aktivis perempuan dan bertanyalah *concern* mereka sebelum melakukan wawancara (Swara Nusa, 2008: 30) untuk membuat pemberitaan menjadi lebih komprehensif (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).

(8) Sebelum melakukan wawancara, pertimbangkanlah mengenai kelompok mana yang memiliki kecenderungan mendukung, tidak peduli atau menentang isu kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual (Swara Nusa, 2008: 30). Kekeliruan wartawan dalam memilih narasumber akan berdampak negatif bagi pembaca (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

(9) Tonjolkanlah fenomena psikologis *survivor* kekerasan terhadap perempuan dan ulas trauma-trauma yang mungkin akan dialami (Swara Nusa, 2008: 30). Menurut Annisa Armaelis (wawancara, 21 Juli 2014), pertanyaan wawancara harus dirumuskan dengan tepat sehingga tidak menimbulkan kekerasan baru bagi *survivor*. Jurnalis biasanya disarankan untuk meminta bantuan kepada pendamping *survivor* yang bersangkutan sebelum dan ketika melakukan wawancara (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).

(10) Hindari penggunaan terma yang memojokkan perempuan korban kekerasan dan terma yang justru membenarkan pelaku kekerasan (Swara Nusa, 2008: 30). Menurut Emilda Rizky (wawancara, 21 Juli 2014), hal tersebut hanya akan menciptakan bentuk kekerasan baru bagi korban.

(11) Isu pekerja seks dan perdagangan perempuan merupakan isu besar, maka berhati-hatilah dalam meliputnya (Swara Nusa, 2008: 30). Jurnalis harus mempelajari terlebih dahulu situasi kekinian maupun latar belakang kasus tersebut sebelum melakukan wawancara (Okta, wawancara, 16 Juli 2014) demi keamanan, maupun kenyamanan, semua pihak yang terlibat dalam peliputan.

(12) Tidak semua pihak menggunakan istilah pekerja seks, maka tanyakan kembali jika hendak melakukan wawancara, identitas apa yang nyaman bagi mereka (Swara Nusa, 2008: 30). Hal tersebut dilakukan untuk membuat narasumber nyaman ketika diwawancarai. Annisa Armaelis mengatakan bahwa ketika merasa tidak nyaman, narasumber biasanya enggan berbicara banyak (wawancara, 21 Juli 2014). Emilda Rizky (wawancara, 21 Juli 2014) menambahkan bahwa ketika narasumber tidak memanfaatkan ruang bicaranya dengan maksimal, ketidakadilan yang dialami narasumber tidak akan sepenuhnya terungkap. Dalam konteks seperti ini, prinsip penguatan juga tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

(13) Munculkan suara perempuan yang biasanya tidak muncul di media (Swara Nusa, 2008: 30). Perempuan yang dimaksud, misalnya perempuan pedesaan, perempuan difabel dan perempuan dari etnik, perempuan positif HIV dan berstatus AIDS, serta kelompok sosial lain yang termarginalkan (Okta, wawancara, 16 Juli 2014).

(14) Mendeskripsikan perempuan sebagai individu yang memiliki hak (Swara Nusa, 2008: 30). Jurnalis tidak boleh mendeskripsikan perempuan hanya sebagai istri pejabat, istri presiden, istri pakar dan lain sebagainya (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014). Deskripsi semacam itu hanya akan melanggengkan diskriminasi berbasis gender---bahwa perempuan hanya mampu “mengekor” (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

(15) Ulas kisah perempuan dan laki-laki yang bekerjasama tidak hanya dalam membangun masyarakat, tetapi lebih dari itu, menggambarkan secara tetap relasi gender sebagai suatu

konstruksi budaya yang menyebabkan dehumanisasi perempuan dan laki-laki (Swara Nusa, 2008: 30). Hal tersebut dilakukan untuk membangun kesadaran kritis pembaca.

(16) Mempertanyakan tentang mengapa perempuan dikeluarkan dari peran tertentu untuk membuat pembaca mengetahui bagaimana relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan berpotensi menciptakan diskriminasi berbasis gender (Mukhotib, wawancara, 18 Juli 2014).

(17) Tidak diperkenankan menggambarkan perempuan dalam peran stereotipnya, misalnya “ibu yang baik”, “setan penggoda”, “penyebarkan fitnah” dan sebagainya (Swara Nusa, 2008: 30). Annisa Armaelis menjelaskan bahwa penggambaran seperti itu hanya akan melanggengkan konstruksi budaya yang tidak sensitif gender (wawancara, 21 Juli 2014).

(18) Hindari memperlakukan keberhasilan perempuan sebagai hadiah dari laki-laki atau sebagai sesuatu yang bersifat pengecualian (Swara Nusa, 2008: 30). Apresiasi terhadap kompetensi dan pencapaian seseorang harus diberikan tanpa memandang jenis kelamin (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014). Emilda Rizky menyimpulkan bahwa masyarakat harus diajak untuk belajar menilai seseorang, bukan dari jenis kelamin, melainkan kemampuan yang orang tersebut miliki (wawancara, 21 Juli 2014).

(19) Hindari mengonsentrasikan penampilan fisik perempuan yang tidak relevan dengan berita yang dibuat (Swara Nusa, 2008: 30). Penggambaran fisik yang tidak relevan dengan pemberitaan dapat menguatkan stereotip yang tidak adil (Armaelis, wawancara, 21 Juli 2014).

(20) Tidak memusatkan pada cerita sensasional mengenai perempuan yang memilih keluar dari peran tradisionalnya dan dikaitkan dengan penyimpangan tradisi (Swara Nusa, 2008: 30). Setiap perempuan memiliki hak atas dirinya sendiri (Rizky, wawancara, 21 Juli 2014).

(21) Kaitkan isu-isu gender dengan relasi-relasi kuasa di sekitar subjek pemberitaan (Swara Nusa, 2008: 30) untuk membuat pembaca memiliki kesadaran kritis. Jurnalis harus memilih narasumber yang berimbang secara relasi kuasa, maupun relasi gender (Zaky, wawancara, 16 Juli 2014).

Sayangnya, terdapat beberapa poin yang seakan hanya mengakomodir kepentingan perempuan, yaitu poin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 dan 20. Hal ini bertentangan dengan pendapat Swara Nusa yang menyatakan bahwa korban diskriminasi berbasis gender tidak hanya perempuan. Penindasan, perdagangan manusia, status HIV positif maupun AIDS, marginalisasi dalam kelompok etnis dan bentuk lain dari diskriminasi berbasis gender juga dapat menimpa laki-laki, namun hal tersebut tampak kurang menjadi perhatian Swara Nusa ketika merumuskan pedoman reportase. Hal tersebut dapat berekses buruk, yaitu semakin banyak korban kekerasan berbasis gender.

KESIMPULAN

Swara Nusa menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui kebijakan redaksional di tingkat jurnalistik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh interaksi sosial Swara Nusa terhadap lembaga sosial

lain di sekitarnya yang juga memperjuangkan kesetaraan dan keadilan berbasis gender, misalnya PKBI dan komunitas dampingannya, yaitu Perempuan Pekerja Seks atau PPS, komunitas waria, gay, remaja jalanan, remaja sekolah dan komunitas lain yang rentan mendapatkan diskriminasi berbasis gender. Swara Nusa merupakan representasi dari kelompok masyarakat tersebut, maka kebijakan redaksional Swara Nusa diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi mereka yang cenderung dirugikan dalam fenomena ketimpangan gender.

Hal di atas berkaitan dengan *circuit of culture* dalam Teori Representasi Stuart Hall. *Circuit of culture* membantu kita mengetahui bagaimana proses produksi dan artikulasi makna dalam sebuah konteks budaya (Hall, 1997: 15). Interaksi sosial yang berbeda membuat makna juga diproduksi dan dipertukarkan secara berbeda. Makna gender yang diproduksi oleh pers populer tentu berbeda dengan makna gender yang diproduksi oleh pers berkualitas. Swara Nusa dikategorikan sebagai pers berkualitas. Swara Nusa, melalui proses produksi berita, memproduksi makna gender dengan perspektif yang lebih adil.

Swara Nusa memproduksi makna gender dari perspektif yang lebih adil dengan menerapkan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional di tingkat jurnalistik yang meliputi pemilihan fakta sosial, pemilihan *angle*, teknik penulisan dan teknik reportase. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional Swara Nusa ditujukan untuk mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan berbasis gender kepada masyarakat Indonesia karena seperti yang diungkapkan Debra J. Huls (Mukhotib, 1998: xii-xiii), keadilan gender merupakan wujud dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan tanpa penegakan keadilan berbasis gender, maka wujud HAM akan tumpang.

Swara Nusa mengusung tiga isu dalam pemberitaannya, yaitu isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam pemberitaan Swara Nusa berkaitan erat dengan pembahasan isu gender. Pemilihan isu ini dilatarbelakangi oleh tingginya diskriminasi berbasis gender di tengah masyarakat karena adanya sederet relasi kuasa yang tidak berorientasi pada kesetaraan. Swara Nusa menugaskan jurnalisnya yang tersebar di 18 kota besar di Indonesia untuk melakukan pemberitaan mendalam terhadap berbagai ketimpangan berbasis gender yang terjadi di tengah masyarakat. Ulasan mendalam tersebut ditujukan untuk mencerdaskan pembaca yang selama ini terjebak dalam konstruksi budaya yang tidak adil perihal gender.

Selain melalui pemilihan isu, Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender dalam kebijakan redaksional mengenai pemilihan *angle*. Pemilihan *angle* dalam pemberitaan Swara Nusa selalu mengacu pada nalar berbasis hak. Swara Nusa memprioritaskan ruang bicara kepada mereka yang cenderung dirugikan perihal kasus diskriminasi berbasis gender. Swara Nusa juga membangun kesadaran kritis pembacanya dengan mengaitkan isu gender dengan semua relasi kuasa yang ada di sekitar subjek pemberitaan dan cenderung bersifat diskriminatif. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi Swara Nusa (2008: 1), yaitu membebaskan cara berpikir dan

bertindak yang selama ini terbelenggu oleh hubungan kekuasaan yang tidakimbang dan menyudutkan sebagian kelompok, serta membenarkan yang lain secara tidak adil.

Penerapan jurnalisme sensitif gender juga tampak pada kebijakan redaksional Swara Nusa dalam konteks penulisan, khususnya melalui penggunaan terminologi atau istilah yang mendukung ideologi Swara Nusa. Ketika *circuit of culture* menjelaskan bahwa media kebanyakan cenderung menggunakan banyak terminologi yang tidak berpihak pada kesetaraan dan keadilan berbasis gender dalam rangka memenangkan kepentingan kelompok dominan, Swara Nusa melakukan hal sebaliknya. Swara Nusa, melalui kebijakan redaksional perihal penulisan, menerapkan jurnalisme sensitif gender dengan merumuskan kamus terminologi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

Selain itu, Swara Nusa menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui kebijakan redaksional dalam konteks reportase. Kebijakan redaksional tersebut meliputi ketentuan penerapan empat prinsip dalam reportase, yaitu prinsip partisipasi, prinsip akuntabilitas, prinsip diskriminasi dan prinsip penguatan. Prinsip partisipasi diwujudkan melalui pemilihan narasumber. Swara Nusa memprioritaskan partisipasi bebas dan aktif dari narasumber-narasumber yang cenderung dirugikan dalam suatu kasus kekerasan berbasis gender. Kontak-kontak formalitas dengan kelompok elite tetap dilakukan walaupun tidak secara intensif. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengenali para penanggung jawab pemenuh hak, seperti pemerintah, sektor swasta dan aparat penegak hukum. Swara Nusa, melalui penerapan prinsip akuntabilitas, mengupayakan *cover both side* sekaligus mengingatkan tanggung jawab para pemenuh hak.

Swara Nusa juga menerapkan jurnalisme sensitif gender melalui prinsip non diskriminasi dalam reportasenya. Prinsip ini secara khusus difokuskan kepada individu atau kelompok yang tidak diuntungkan, misalnya dalam kasus perkosaan, wartawan Swara Nusa diwajibkan untuk memosisikan diri sebagai teman bicara ketika melakukan wawancara sehingga narasumber merasa nyaman dan tidak merasa dipojokkan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip penguatan. Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa Swara Nusa bukanlah media yang melakukan advokasi hanya dengan meliput lalu mempublikasikan berita, namun lebih dari itu, Swara Nusa mengawal usaha subjek pemberitaan untuk mendapatkan haknya dengan melakukan intervensi---mengajak subjek pemberitaan yang bersangkutan menjadi agen perubahan yang sesungguhnya.

Swara Nusa menjunjung tinggi keempat prinsip tersebut dalam reportasenya. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk jurnalistik yang ramah gender. Swara Nusa juga memiliki sebuah panduan reportase, dengan 21 poin di dalamnya, yang berorientasi kepada terciptanya kesetaraan dan keadilan berbasis gender. Sayangnya, terdapat beberapa poin yang seakan hanya mengakomodir kepentingan perempuan. Hal ini bertentangan dengan pendapat Swara Nusa yang menyatakan bahwa korban diskriminasi berbasis gender tidak hanya perempuan.

SARAN

Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media dapat diteliti bukan hanya dari kebijakan redaksional yang meliputi pemilihan fakta sosial, pemilihan *angle* penulisan, teknik penulisan dan teknik reportase. Penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media juga dapat diteliti dengan mengukur tingkat pemahaman para pelaku media yang bersangkutan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut lebih tepat jika dikaji menggunakan pendekatan kuantitatif.

Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai penerapan jurnalisme sensitif gender dalam sebuah media bisa didapatkan ketika peneliti juga mengkaji praktik organisasi kerja redaksional. Praktik organisasi kerja redaksional dapat meliputi struktur organisasi, kebijakan mengenai rekrutmen, promosi, mutasi dan penempatan, serta pendelegasian tugas. Peneliti selanjutnya dapat mengulas lebih dalam, misalnya mengenai proporsi pekerja perempuan dan laki-laki dalam sebuah media dan kaitannya dengan penerapan jurnalisme sensitif gender oleh media yang bersangkutan.

Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan verifikasi data terhadap efektivitas penerapan berbagai prinsip dalam reportase Swara Nusa karena penelitian ini hanya mengulas penerapan prinsip tersebut dari satu sisi, yaitu sisi Swara Nusa. Verifikasi data dapat dilakukan kepada subjek-subjek pemberitaan Swara Nusa.

Secara garis besar, riset ini menunjukkan bahwa permasalahan media berkonten khusus, dalam hal ini Swara Nusa, tidak hanya terletak pada bagaimana media yang bersangkutan mengimplementasikan ideologi yang diusung melalui kebijakan redaksionalnya, tetapi lebih dari itu, Swara Nusa ternyata juga bermasalah dalam hal manajemen. Swara Nusa menerapkan rangkap posisi dalam manajemennya. Rangkap posisi membuat produktivitas Swara Nusa tidak maksimal. Hal itu terbukti oleh mati surinya Swara Nusa sejak akhir 2013 hingga saat ini, padahal Swara Nusa merupakan kantor berita satu-satunya di Indonesia yang mengulas dalam mengenai isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, serta HAM. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa rangkap posisi dalam manajemen Swara Nusa membuat fokus mereka terpecah, terutama untuk mereka yang menjabat sebagai staf. Peneliti selanjutnya dapat mengulas permasalahan dalam hal manajemen Swara Nusa ini lebih dalam di kesempatan berikutnya.

Swara Nusa merupakan “angin segar” dalam perjuangan kesetaraan. Keberadaan Swara Nusa sebaiknya terus diperjuangkan karena pemahaman masyarakat Indonesia mengenai isu yang diusung Swara Nusa masih tergolong dangkal. Terbilang lainnya produksi Swara Nusa sebenarnya terkait dengan kelemahan dan kekurangan PKBI sebagai sebuah LSM. Kelemahan LSM, menurut Kartjono (Priyono, 1996: 113), antara lain karena tidak ada dukungan formal beserta segala prasarannya. Kegiatan LSM seringkali bersifat eksperimental, kurang ekspertise dan didukung administrasi yang lemah, serta kurang terampil.

Permasalahan internal yang dihadapi LSM antara lain berkaitan dengan kondisi dan dinamika lembaga yang bersangkutan, misalnya kaburnya visi dan misi dalam penjabaran operasional

kegiatan, gaya kepemimpinan dan gaya kerja yang tidak sesuai dengan misi lembaga (Priyono, 1996:113). Permasalahan lain berhubungan dengan dukungan relawan yang cenderung kurang profesional, adanya mekanisme, struktur, pembagian kerja dan manajemen yang kurang efisien dan efektif sehingga menghasilkan perencanaan kerja yang kurang matang. Selain itu, LSM juga menghadapi masalah keterbatasan dana dan ketergantungan pada pihak donatur. Slameto (Priyono, 1996: 113) mengatakan rendahnya imbalan yang diterima para staf dan relawan dapat mengakibatkan lemahnya kontrol dan berkurangnya disiplin serta etos kerja. Segenap kelemahan dan kekurangan di atas membuat LSM, tidak terkecuali PKBI, perlu lebih diberdayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin, Alfathri (ed). 2006. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Dahlgren, Peter dan Colin Sparks. 1992. *Journalism and Popular Culture*. London: SAGE Publications.
- Hall, Stuart (ed). 1997. *The Work of Representation. Representation: Cultural Representation and Signifying Practice*. London: Sage Publication.
- Ishak, Aswad dkk (ed). 2011. *Mix Methodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: ASPIKOM.
- Listiorini, Dina. 2009. *Modul Mahasiswa Media, Gender dan Seksualitas*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mukhothib MD (ed). 1998. *Menggagas Jurnalisme Sensitif Gender*. Yogyakarta: PMII Komisariat IAIN Sunan Kalijaga.
- Priyono, Onny dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Internet

- Antara. 2009. *PKBI Rintis Kantor Berita Swara Nusa* dalam <http://www.antaranews.com/print-/136531/pkbi-rintis-kantor-berita-swara-nusa>, diakses pada Rabu, 9 April 2014 pukul 15.28 WIB.
- KBBI. *Definisi Penerapan* dalam <http://www.kbbi.web.id/penerapan>, diakses pada Jumat, 2 Mei 2014 pukul 23.48 WIB.
- Nurhasanah. 2011. *Resensi "Kebijakan Redaksional Surat Kabar Media Indonesia dalam Penulisan Editorial* dalam <http://tulis.uinjkt.ac.id/opac/themes/katalog/detail.jsp?id=-100973&lokasi=lokal>, diakses pada Senin, 12 Mei 2014 pukul 15.42 WIB.
- Utama, Lingga Tri. 2013. *Remaja Hamil Itu Korban* dalam <http://www.swaranusa.net/index.php?lang=id&rid=31&id=823>, diakses pada Minggu, 11 Mei 2014 pukul 22.12 WIB.
- WHO. *Gender and Human Rights: Sexual Health* dalam http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/sexual_health/en/index.html, diakses pada Rabu, 5 Desember 2012 pukul 22.25 WIB.

Dokumen Internal

- Swara Nusa. 2008. *Nalar Kerja Swara Nusa*. Yogyakarta: Swara Nusa.